

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA
(RASTRA) DI DESA SIABU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

**LAILA SARI HASANAH
NPM : 167110246**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Laila Sari Hasanah
Npm : 167110246
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Saejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

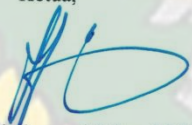
Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat distujui untuk di sidangkan dalam ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 6 Januari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing,

Ketua,


Lilis Suryani, S. Sos., M. Si.


Prof. Dr. H. Sufian, SH, M. Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

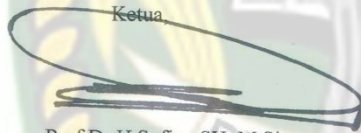
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Laila Sari Hasanah
Npm : 167110246
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Saejahtera.
(Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konfhensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

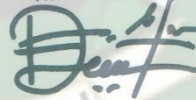
Pekanbaru, 6 Januari 2020

Ketua,



Prof. Dr. H. Sufian, SH., M.Si

Sekretaris,



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Anggota,



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,



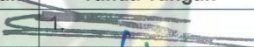

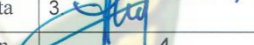
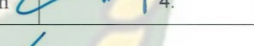
Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1318/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 22 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 23 desember 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Laila Sari Hasanah
NPM : 167110246
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) Di Desa Siabu Kabupaten Kampar**
Nilai Ujian : Angka : " 79 " ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si	Ketua	
2.	Made Devi Wedayanti, S.AP.,M. Si	Sekretaris	
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	
4.		Notulen	

Pekanbaru, 23 Desember 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1318/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Laila Sari Hasanah
N P M : 167110246
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) Di Desa Siabu Kabupaten Kampar.
- Struktur Tim :
1. Prof. Dr. Suffian H. , M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Hendry Andry, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi
 4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

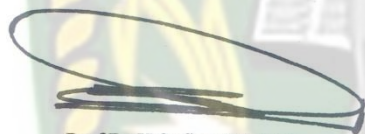
Nama : Laila Sari Hasanah
Npm : 167110246
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Saejahtera
(Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswi bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 6 Januari 2020

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekertaris,



Prof. Dr. H. Sufian, SH., M.Si

Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Turut Menyetujui,

Pembantu Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik,
Ketua,



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi

Yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit

Tanda bukti dan ucapan terima kasih ku kepada

Segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang

Telah berjasa dalam perjalanan kehidupan ku

Sampai saat ini.

Khusus untuk Ayahanda **S.SUHARJONO**

Bersama Ibu **IBU RAHMIATUN** yang tercinta.

Terima kasih seluruh limpahan kasih sayang yang tidak

Berbatas yang telah beliau curahkan kepadaku,

Semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan

Karunia yang tiada terputus kepada beliau, amin...

Terima kasih atas semua yang membantu ku

Baik material maupun moril serta memotivasiku

Dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua

Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt.

Mencatat sebagai amal baik beliau dan

Membalasnya dengan rahmat dan karunia yang

Setimpal, amin...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat Rahmant dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar”** penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses Studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediayak fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan serta memebrikan ilmu pengetahuan dan penulis sangat berbantu dalam penyelesaian Skripsi.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos,M.Si selaku Sekertaris Prodi Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Sufian Hanim, SH., M.Si Selaku Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan menyumbangkan pemikiran

kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan istimewa ucap terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta S.Suharjono dan Ibunda tercinta Rahmiatun, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada abang dan kakak Agus, Suharmono, Endang, Sri handayani serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu pesatu yang telah memebri semangat, motivasi, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan doa serta dukungan juga memberikan alat-alat fasilitas dan menunjang selesainya Skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan fitria Ningsih, Niki Hendarki, Ulan Puspita,Siska Ramadani,Selsi Sartika dan seluruh kelas AP angkatan 2016 dan orang-orang terdekat saya

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

11. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarananya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin. Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 5 Desember 2020

Penulis,

Ttd,

Laila Sari Hasanah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	23
2.1 Studi Kepustakaan	23
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik	23
2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik	25
2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik	28
2.1.4 Konsep dan Teori Kebijakan Publik	32
2.1.5 Konsep dan Teori Implementasi	34
2.1.6 Konsep Kegiatan Rastra	37
2.2 Kerangka Pikir	39
2.3 Konsep Operasional	40
2.4 Operasionalisasi Variabel	41
2.5 Teknik Pengukuran	43
BAB III : METODE PENELITIAN.....	46

3.1 Tipe Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Populasi dan Sampel	46
3.4 Teknik Penarikan Sampel	48
3.5 Jenis dan Sumber Data	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	49
3.7 Teknik Analisa Data	50
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	50
3.9 Rencara Sistematika Laporan Penelitian	51
BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kampar	53
4.2 Tugas dan Pokok Fungsi Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar	54
4.3 Jumlah Penduduk Desa Siabu Kabupaten Kampar	57
4.4 Struktur Organisasi Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar	58
4.5 Sumber Daya Organisasi Kantor Desa Siabu	58
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Identitas Responden	63
5.1.1 Jenis Kelamin	63
5.1.2 Tingkat Umur	64
5.1.3 Tingkat Pendidikan	66
5.1.4 Mata Pencarian	68
5.2 Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	69
5.2.1 Komunikasi	69
5.2.2 Sumber Daya	75
5.2.3 Disposisi	79
5.2.4 Struktur Birokrasi	83

5.3 Hambatan dari Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	90
BAB VI : PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
LAMPIRAN	99



DAFTAR TABEL

1.1	: Masyarakat Penerima Rastra di Desa Siabu Kabupaten Kampar.....	18
1.2	:Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Rastra di Dusun Sai Abang Desa Siabu Kabupaten Kampar	19
2.1	:Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	41
3.1	:Populasi dan Sampel Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	47
3.2	:Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	50
4.1	:Jumlah Penduduk Desa Siabu Kabupaten Kampar	57
4.2	:Jumlah Pegawai Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar Tingkat Pendidikan	60
4.3	:Daftar Inventaris Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar	61
5.1	:Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Jenis Kelamin Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	63
5.2	:Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Jenis Kelamin Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	64
5.3	:Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Tingkat Umur Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	65
5.4	:Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Tingkat Umur Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera di Desa Siabu Kabupaten Kampar	65
5.5	:Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Tingkat Pendidikan Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	66
5.6	:Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Menurut Tingkat Pendidikan Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	67

5.7	:Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Mata Pencarian Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	68
5.8	:Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Mata Pencarian Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	69
5.9	:Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Komunikasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kampar	71
5.10	:Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Komunikasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kampar	73
5.11:	Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Sumber Daya Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar	76
5.12	:Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Sumber Daya Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kamapar	78
5.13	:Distribusi Jawban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Disposisi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar	80
5.14	:Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Disposisi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar	82
5.15	:Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Struktur Birokrasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar	84
5.16	:Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Merima Rastra Tentang Struktur Birokrasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar	86
5.17	:Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Indikator Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar	88

5.18 :Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Indikator Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar

..... 89



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 :Bagan Alur Penyaluran Rastra.....	13
1.2 :Gambar Diagram Data Penerima Beras Sejahtera (Rastra) Berdasarkan Pekerjaan.....	19
2.1 :Proses Manajemen Strategi dari Hunger dan Wheelen.....	29
2.2 :Proses Manajemen Strategi Sufian	29
2.3 :Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	39
4.1 :Bagan Struktur Organisasi Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Responden Masyarakat Penerima Rastra Penelitian Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	102
2. Daftar Kuisisioner Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Penelitian Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	107
3. Daftar Wawancara Untuk Kepala Desa Siabu Penelitian Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	112
4. Daftar Wawancara Untuk Perangkat Desa Siabu Penelitian Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar	113

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Sari Hasanah
NPM : 167110246
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabuapten Kampar

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan admisistratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya bener telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataab butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2020
Selaku pernyataan,

Laila Sari Hasanah

**IMPLEMENTASI KEGIATAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA
(RASTRA) DI DESA SIABU KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK**

LAILA SARI HASANAH

Kata Kunci : Implementasi, dan Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Indikator penilaian Implementasi yang dipergunakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif, dengan metode kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi, Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Responden dan Informan Dusun Sai abang, yaitu berjumlah 30 orang penerima rastra, 6 orang responden, dan 10 orang yang tidak menerima rastra. Teknik yang digunakan adalah metode sensus. jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan deskriptif. Berdasarkan teknik analisa ini penelitian menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Srjahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar Cukup Terlaksana, masih adanya beberapa masyarakat dusun sai abang yang tidak terdaftar dalam keluarga penerima rastra dan kurangnya updatenya basis data terpadu yang ada pada pemerintah. Hasil yang di dapat dari kegiatan penyaluran rastra ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran mereka.

**IMPLEMENTATION OF PRIVATE RICE DISTRIBUTION ACTIVITIES
(RASTRA) IN SIABU VILLAGE, KAMPAR DISTRICT
ABSTRACT**

LAILA SARI HASANAH

Keywords : Implementation and Prosperous Rice Distribution Activities

This study aims to determine the results of research on the Implementation of Prosperous Rice Distribution Activities in Siabu Village, Kampar Regency. Implementation assessment indicators used include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. This research uses descriptive type, with complementary quantitative and qualitative methods, namely a study that aims to obtain an overview and understand and explain how the Implementation of Prosperous Rice Distribution Activities (Rastra) in Siabu Village, Kampar Regency. The population and sample in this study were Respondents and Informants of Sai Abang Hamlet, namely 30 people who received rastra, 6 respondents, and 10 people who did not receive rastra. . The technique used is the census method. Types and data collection techniques used consisted of primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data were collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is descriptive. Based on this analysis technique, the research assessed and concluded that the implementation of the distribution of rice for Sr welfare (Rastra) in Siabu Village, Sai Abang Hamlet, Kampar Regency was sufficiently carried out, there were still some residents of Sai Abang Hamlet who were not registered in the rastra recipient family and the lack of updating of existing integrated databases. to the government. The results obtained from this rastra distribution activity are very beneficial for the community because it can help the community in reducing their expenditure burden.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 mengeluarkan data mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan dan perdesaan menurut kelompok barang. Data tersebut menunjukkan bahwa padi-padian dalam hal ini adalah beras masih menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Masyarakat miskin rata-rata membelanjakan 67% pendapatannya untuk makanan, 28% untuk perumahan dan pengeluaran lainnya, serta pendidikan/kesehatan sebesar 5%. Khusus untuk pangan, yang dibelanjakan sekitar 29% adalah untuk beras. Melihat data tersebut, terlihat betapa pentingnya dan besarnya pengeluaran masyarakat untuk membeli beras.

Menurut Bustanul (2001:242) di Indonesia, beras memberikan peran hingga sekitar 45% dari total food-intake, atau sekitar 80% dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut relatif merata di seluruh Indonesia, maksudnya secara nutrisi, ekonomi, sosial, dan budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting bagi sebagian besar masyarakat. Kondisi ini sebenarnya merupakan hasil perekayasa kultural yang memberi konsekuensi luas. Hal ini yang kemudian yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pangan Indonesia, yang mana harus menempatkan kebijakan perberasan (Rice policy) sebagai salah satu pilar utamanya.

Program Beras Miskin (Raskin) dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Instrumen

kebijakan dari program Raskin ini adalah Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan penyaluran pangan secara khusus yang diutamakan bagi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan mereka, maka diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran meningkat serta terlindungi dari rawan pangan dan kekurangan nutrisi khususnya karbohidrat.

Dalam perspektif ketahanan pangan maka Raskin juga tidak hanya membantu pada tingkat penerima Raskin tetapi juga pada level nasional dengan adanya pembelian terhadap gabah dan beras. Pembelian tersebut diharapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, dan Raskin sebagai outlet dari produksi petani dalam hal ini.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia selama ini cukup membawa kemajuan secara umum dan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum di nikmati oleh sebagian besar masyarakat terutama yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan

kemiskinan yang berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang. Adapun kedudukan pemerintah daerah dan desa dalam pasal 18B yaitu: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang.

Untuk mengimplementasikan pasal 18 dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, diantaranya UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 19 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 .

Prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pemberian pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desa merupakan satuan pemerintah terendah yang

dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusawaratan Desa.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan pemerintahan desa, maka diterbitkanlah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang mana merupakan penjabaran lebih lanjut tentang pasal-pasal dalam UU Tahun 2004 yang berkaitan dengan pemerintahan desa itu sendiri.

Pemerintahan Desa menurut peraturan pemerintahan No 72 Tahun 2005 tentang desa yang tertuang dalam pasal (1) ayat (5). Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asla-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam islam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakn publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prodesur, tehnik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Bila dicermati persoalan ketahanan pangan ini tak lepas dari kondisi perekonomian di suatu negara. Karena secara logis, seseorang yang hidupnya sudah sejahtera atau mapan perekonomiannya tentu dapat mengatasi permasalahan kebutuhan pangan dalam kehidupannya. Maka untuk itu tidaklah mengherankan apabila masalah ketahanan pangan ini sering muncul di negara-negara miskin dan berkembang.

Dalam lingkup ini, Indonesia dengan kondisi perekonomian yang belum stabil dan mayoritas rakyatnya yang masih hidup dalam jurang kemiskinan relatif maupun absolut, kelaparan merupakan ancaman yang nyata bagi kesejahteraan bangsa. Masalah ketahanan pangan di Indonesia, semakin mengawatirkan ketika perekonomian Indonesia diperparah oleh gelombang krisis yang telah memporak-porandakan sistem perekonomian. Kondisi ini telah berkali-kali selama dua windu terakhir sejak pertengahan 1997, sehingga dampak yang ditimbulkan masih sangat terasa.

Salah satu kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidup adalah pangan. Dibandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya, kecukupan pangan lainnya, kecukupan pangan merupakan kebutuhan vital manusia. Oleh karena itu, bagaimana upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik yang dilakukan secara individual, kelompok, maupun dalam lingkup negara. Seperti apa yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar terutama dalam pasal 34 yang secara jelas menyebutkan, “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”. Artinya bahwa masalah-masalah kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab negara., termasuk dalam hal ini adalah masalah

ketahanan pangan dan persoalan-persoalan kelaparan serta malnutrisi. Selain itu menurut UU pangan No. 7 Tahun 1996 tentang ketahanan pangan, “hak untuk memperoleh pangan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki”. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak memperoleh bahan pangan yang cukup dalam kondisi apapun. Namun demikian, kewajiban untuk mewujudkan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, negara harus selalu berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup untuk warganya, terutama kelompok miskin.

Adapun menurut Wrihatnolo dalam Nugroho (2007:33-34) upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial.

Sementara itu Rondinelli, (1990:91) mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin yakni:

1. Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang miskin hidup, melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa.
2. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia.
3. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus

berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.

Program beras miskin (raskin) adalah program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Meskipun demikian masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state.

Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas raskin, hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima raskin. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut di bawa ke musyawarah desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang terangkap atau yang tidak sesuai, kemudian musyawarah Desa memilih dan menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai jumlah plafon yang disediakan. Pemilihan dapat menggunakan sistem rengking sehingga hanya mereka yang benar-benar paling miskin dan rawan pangan saja yang dipilih. Hasil musyawarah desa perlu diketahui oleh seluruh masyarakat.

Dalam PSE05, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang.

2. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan.
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Berdasarkan hal itulah pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pangan bagi penduduk miskin melalui program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Program Raskin adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga miskin. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan salah satu bagian dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKS-BBM). Tujuan utama yang dicenangkanya program tersebut adalah dalam upaya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pangan, khususnya bagi penduduk miskin, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Adapun mekanisme kegiatan penyaluran RASKIN dari BULOG ke Desa adalah:

1. Berdasarkan pegu raskin, Bupati/Wali Kota/Ketua Tim Koordinasi raskin Kabupaten/Kota/Pejabat yang di tunjuk oleh Bupati/Wali Kota menerbitkan SPA kepada Perum bulog.
2. Berdasarkan SPA, Perum bulog menerbitkan SPPB beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan.
3. Sesuai dengan SPPB maka perum bulog menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh tim koordinasi raskin digedung perum bulog.

4. Di TB dilakukan serah terima beras antara perum bulog dengan tim koordinasi raskin atau pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua pihak.
5. Perum bulog membuat pedoman khusus penyaluran raskin penyaluran raskin sampai TB.

Selanjutnya mekanisme penyaluran raskin dari Desa ke RTS-PM adalah:

1. Masyarakat yang sudah daftar dan mempunyai KPS datang ke Kantor Desa.
2. Menunjukkan KPS kepada tim pelaksana raskin di Desa.
3. Membayar harga tebus raskin sebesar Rp.1.600/kg.
4. Raskin di timbang oleh tim pelaksana raskin.
5. Kemudian tim pelaksana raskin menyerahkan raskin tersebut kepada RTS-PM yang bersangkutan.

Harapan dari implementasi program ini adalah agar penduduk miskin tidak mengalami kekurangan pangan, dengan demikian kesejahteraan mereka pun akan sedikit terjamin.

Namun, sebagaimana layaknya sebuah kebijakan pemerintahan terdahulu, Program beras untuk keluarga miskin rentan terhadap penyimpangan dalam proses implementasinya. Kebijakan pemerintah untuk membrkan bantuan pangan kepada keluarga miskin ini sering kali tidak sesuai dengan harapan dan tidak tepat sasaran.

Kegiatan Penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) telah dilakukan sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memeperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin.

Pada awalnya disebut program operasi pasar khusus (OPK), Kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin di perluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penerapan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin.

Program raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertical (Pemerintah Pusat Sampai Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas kementrian/lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Raskin.

Pada tahun 2017 Peogram Raskin pun berubah nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera), Beras Sejahtera adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Selanjutnya, tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial.

Dengan demikian, terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebusan yang harus dibayar

oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi kebutuhan dasar.

Berdasarkan pedoman umum Bansos Rastra, perlu disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Bansos Rastra dalam peraturan menteri keuangan No.228/PM/.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No.254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian/lembaga negara pada pasal 40 sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Pengguna Anggaran memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga berkenaan.

Berdasarkan pedoman umum yang telah ditetapkan oleh pengguna Anggaran diatas, kuasa pengguna anggaran memiliki kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis pengelola bantuan sosial.

Dalam pelaksanaan penyaluran, perum Bulog mendapat tugas untuk mendistribusikan Bansos Rastra hingga Titik Distribusi (TD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pendistribusian ke titik bagi. Diharapkan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya, kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alur penyaluran Rastra tersebut dari gudang Bulog langsung diturunkan ke Desa melalui pengawasan Pemerintah Daerah dan Kecamatan, kemudian dari Desa langsung dibagikan ke masyarakat. Jika dapat disimpulkan bahwa alur penyaluran Rastra tersebut dari gudang Bulog langsung diturunkan ke Desa melalui pengawasan Pemerintah Daerah dan Kecamatan, kemudian dari Desa langsung dibagikan ke masyarakat.

Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka alur penyaluran Rastra adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1: Bagan alur penyaluran Rastra

Sumber: Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar 2020

Salah satu daerah yang juga bertanggung jawab dalam pendistribusian Rastra adalah Kabupaten Kampar, hal ini tercantum di dalam Peraturan Bupati Kampar No. 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Rastra (Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah) Kabupaten Kampar.

Memutuskan dan menetapkan : Peraturan Bupati Kampar tentang petunjuk teknis (penyaluran raskin beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah) di Kabupaten Kampar Tahun 2013.

- a. Pasal 1 : Pendistribusian rastra di kabupaten kampar tahun 2013, di laksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- b. Pasal 2 : Petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran raskin dikabupaten Kampar tahun 2013, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan penyaluran rakin dikabupaten Kampar.

Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, penyaluran Rastra saat ini pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya.

Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umumnya yang dihadapi diantaranya terhambatnya penyaluran, harga yang tidak sesuai peraturan, dan berbagai persoalan lainnya.

Akhir-akhir ini, kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan rakyat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan ataupun kegagalan dari instansi pemerinrah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif.

Adapun SOP TIM Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan pemerintahan setingkat. Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

1. Kedudukan Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.
2. Tugas Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Namun Rastra yang sudah berjalan dalam dalam beberapa tahun ini masi saja terdapat banyak masalah khususnya dalam penyaluran Rastra. Terdapat Desa Siabu yang memiliki 4 dusun yaitu Dusun Karya nyata, Dusun muaro siabu, Dusun pinaso dan sai abang.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Sai abang di sebabkan karena Dusun Sai abang merupakan Dusun dengan jumlah masyarakat penerima Rastra terkecil juka dibandingkan dengan Dausun yang lainnya.

Sebagai program uang dilaksanakan secara nasional, pemberian Rastra kepada masyarakat mikin juga dilaksanakan di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Desa ini adalah salah satu Desa yang mana mendapat bantuan Rastra dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pendekatan yang di teorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adalah :Komunikasi,Sumber Daya,Disposisi,Struktur Birokrasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah adanya mekanisme suatu sistem dengan kegiatan yang sudah terencana dalam mencapai tujuan kegiatan dengan saling menyesuaikan posisi inrtaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat meraih hasil yang diharapkan sebelumnya.

Berdasarkan Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNPT) keluarga yang layak menerima bantuan Rastra adalah :

1. Keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Keluarga yang memiliki Kartu Sehat (KKS)
3. Keluarga miskin yang datanya tidak terdapat didalam kategori diatas namun diputuskan berdasarkan musyawarah Desa

Penyaluran Rastra di berbagai wilayah Indonesia, masi terdapat banyak kendala, masalah-masalh tersebut diantaranya ketidaktepatan pembaguian penyaluran Rastra seperti ktidak tepatan penerima, waktu pembagian, ketidakpuasan keluarga penerima manfaat sastra jumlah yang harusnya di terima.

Masalah ketidak tepatan waktu pembagian Rastra juga terjadi di Desa Siabu Kabupaten Kampar yang seharusnya dibagikan setiap bulan namun pada kenyataannya sudah tiga bulan dan enam bulan masyarakat setempat belum

menerima beras tersebut. Uraian berikut adalah menyajikan data kependudukan Desa Siabu.

Tabel 1.1 Masyarakat Penerima Rastra di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah KK Penerima
1.	Karya Nyata	474	35
2.	Muaro Siabu	306	58
3.	Pinaso	129	37
4.	Sai Abang	232	30
Jumlah		1.141	160

Sumber: Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar 2020

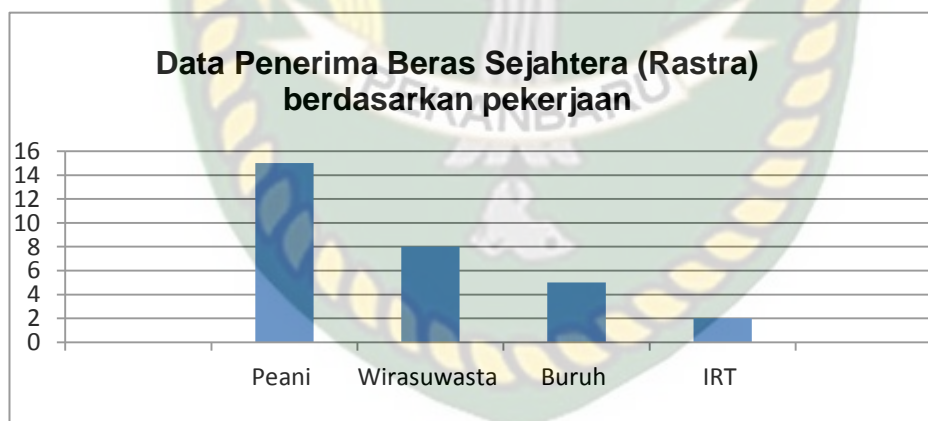
Dari tabel diatas bahwa Desa Siabu Memiliki 4 Dusun,yang terdiri dari jumlah keseluruhan kepala keluarga di Desa Siabu 1.141 KK, serta jumlah keluarga yang menerima Rastra sebanyak 160. Dimana dari data di atas Dusun yang memiliki jumlah KK terbesar adalah Dusun Karya Nyata dengan jumlah 474 KK dengan jumlah penerima manfaat 35 KK, dan Dusun dengan jumlah KK terkecil adalah Dusun Pinaso dengan jumlah 129 KK, dengan Jumlah penerima manfaat 37 KK, sedangkan Dusun yang paling sedikit jumlah penerima manfaat adalah Dusun Sai Aabang dengan jumlah KK 232 dan jumlah penerima 30 KK, maka dari itu penulis tertarik hanya ingin meneliti di Dusun Sai Abang.

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Rastra di Dusun Sai Abang Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Jumlah RT/RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa Dalam Keluarga		Jumlah Penerima Rastra Dalam KK
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	01RT/01RW	68	135	100	6
2.	02RT/01RW	57	122	135	2
3.	02RT/01RW	45	55	70	4
4.	02RT/02RW	35	56	33	13
Jumlah		205	368	338	30

Sumber: Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar 2020

Dari tabel di atas bahwa dusun Sai Abang merupakan dusun yang jumlah masyarakat penerima Rastra terkecil di bandingkan dengan dusun yang ada di Desa Siabu Kabupaten Kampar.



1.2 :Gambar Diagram Data Penerima Beras Sejahtera (Rastra) Berdasarkan Pekerjaan

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Pelaksanaan kegiatan penyaluran Rastra di Desa Siabu mengalami masalah-masalah umum dalam pelaksanaannya seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Rastra di Desa Siabu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah beras yang di dapat tidak menentu, sehingga pembagian rastra yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar menerima rastra di bagi Rata kepada seluruh KK yang ada di Desa Siabu.
2. Berdasarkan Data Keluarga Penerima Rastra di Desa Siabu bahwa masi terdapat beberapa masyarakat Dusun Sai abang yang belum mendapatkan Penyaluran Rastra.
3. Adanya kesalahan data, jumlah keluarga miskin yang tidak cepat diperbaharuai kurang pendataan ulang, ini didasarkan pada wawancara sementara yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat, banyak masyarakat yang mengeluh bahwa kurangnya sosialisasi dan tidak baiknya proses pendataan ulang yang dilakukan oleh pihak Desa, dan masi banyak keluarga yang tergolong kurang mampu namun tidak terdata oleh pihak desa.

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengangkatnya sebagai sebuah kajian penelitian yang berjudul “**Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Siabu Kabupaten Kampar, Dan Bagaimanakah hambatan dalam implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu kabupaten kampar.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu administrasi publik khususnya tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca berkaitan dengan Implementasi Kegiatan Penyaluran Rastra dan di harapkan menjadi acuan bagi peneliti sejenis.
- b. Secara akademis, yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dalam proses pembangunan teori dan konsep terutama terkait pembangunan ilmu administrasi publik di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau.

- c. Sebagai bahan masukan bagi seluruh pegawai kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Bertitik pada sifat umum manusia sebagai makhluk sosial yaitu karena manusia hanya dapat dan mengembangkan diri dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain. Kerjasama anatar manusia itu harus terlaksana, yang mana sebagai makhluk sosial manusia hidup dari interaksi antar sesamanya, dan untuk mengurus hubungan kerja tersebut maka dilakukan dengan administrasi. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia juga berorientasi dengan semakin meningkatnya kualiatys kerja yang di hasilkan manusia.

Mrnurut Siagian (2008:27) administrasi meruakan keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atad rasionalitas tertentu untuk mencapai sustu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Liang Gie (dalam Syafie, 2003:4), adminstrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Hebert A. Simon (dalam Pasalong,2007:2), mendefinisikan Administrasi sebagai kegiatan-krgiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009:9), bahwa administrasi adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modren

yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

Menurut Leonard D. White, Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Luther Gulick, Administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dijadikan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hadart Nawawi, Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pengertian Administrasi Publik menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus, adalah Administrasi publik suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Administrasi publik adalah Administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Arifin Abdulrachman, Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Menurut Edward H. Litchfield, Administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut Dwight Waldo, Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut George J. Gordon, Administrasi publik adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Dari beberapa administrasi yang dikemukakan oleh para ahli maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang yang berkerjasama sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi publik

Organisasi adalah satu unit sosial yang di koordinasikan secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang, yang berfungsi dalam suatu basis yang kontiniu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan.

Organisasi menurut Siagian (2003:6), adalah setiap bentuk persekutuan anatar dua orang atau lebih yang berkerjasama dan secara formal terkait dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Menurut Robbins (1994:4), organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berkerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Zulkifli (2005:73), organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, petunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja, dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009:16) yaitu organisasi merupakan suatu kerjasama sekoelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Surtarto (2006:3), organisasi adalah sebagai kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja atau sistem sosial. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi itu ialah proses kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Didalam setiap organisasi terkandung tiga unsur yaitu:

- a. Kerja sama

- b. Terdiri dari dua orang atau lebih
- c. Tujuan hendak dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Sugandha (1981:32), organisasi adalah setiap bentuk persekutuan anatar dua orang atau lebih yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan terkait secara formal dalam suatu ikatan dimana selalu terdapat hubungan seorang atau kelompok yang disebut pimpinan atau bawahan.

Menurut James D. Mooney, organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Menurut John D. Millet, organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Herbert A. Simon, organisasi adalah organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.

Menurut Chester I Barnard, organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Dwight Waldo, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Luther Gulick, organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

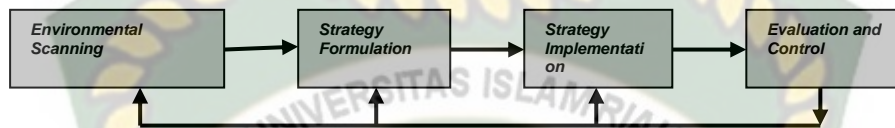
Dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik

Apabila dililait dari konsepnya, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuab organisasi. Konsep manajemensangat erat hubungannya dengan pengertian organisasi, selain sebagai wadah atau tempat manajemenjuga sebagai alat dari pada administrsi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Stoner (dalam Pasolong, 2007:82), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

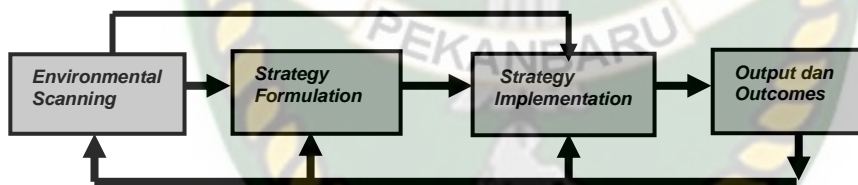
Konsep dan teori manajemen strategis. Hunger dan Wheelen (1996) mengemukakan manajemen strategis didefinisikan sebagai suatu proses dari

manajemen strategis melibatkan empat elemen dasar yang saling berhubungan: (1) *environmental scanning*, (2) *strategy formulation*, (3) *strategy implementation*, and (4) *evaluation and control*. Proses manajemen strategis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Proses Manajemen Strategis dari Hunger dan Wheelen
Sumber: Hunger dan Wheelen (1996)

Selanjutnya proses manajemen strategis menurut Sufian (Disertasi 2002) adalah terdiri dari (1) *environmental scanning*, (2) *strategy formulation*, (3) *strategy implementation*, and (4) *Output dan Outcomes*. Prosesnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Proses Manajemen Strategi Sufian
Sumber: Disertasi (2002)

Dalam setiap organisasi (*corporate*), proses manajemen strategi meliputi aktivitas yang berlangsung terus-menerus dengan pola aktivitas bersifat siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai kepada kegiatan mengevaluasi dan mengawasi. Kelompok manajemen strategi menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi).

kelempok manajemen strategi mengevaluasi hubungan dan menentukan misi organisasi. Tahap pertama, formulasi strategi adalah suatu pernyataan dari misi, tujuan-tujuan, strategi-strategi, dan kebijakan-kebijakan organisasi. Implementasi strategi organisasi merupakan proses program-program, anggaran-anggaran, prosedur-prosedur, dan evaluasi serta kontrol kegiatan sampai kepada output dan outcomes. Output merupakan keluaran dari proses manajemen strategis, sedangkan outcomes hasil yang diperoleh oleh organisasi pada suatu periode proses manajemen strategis yang merupakan unpan balik aktivitas organisasi selanjutnya. Suatu model manajemen strategi sebagai suatu proses yang terus menerus.

Setelah faktor-faktor strategis diidentifikasi, kelempok manajemen strategis mengevaluasi hubungan dan menentukan misi organisasi. Tahap pertama, formulasi strategis adalah suatu pernyataan dari misi, tujuan-tujuan, strategis-strategis, dan kebijakan-kebijakan organisasi. Implementasi strategis organisasi merupakan proses program-program, anggaran-anggaran, dan prosedur-prosedur. Terakhir, evaluasi dan kontrol kegiatan sebagai unpan balik aktivitas organisasi. Suatu model manajemen strategis sebagai suatu proses yang terus menerus.

Haiman (dalam Alamsyah,2011:2), mendefinisikan manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus itulah yang bisa disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Terry (dalam Alamsyah, 2011:4) di singkat dengan POAC.

a. *Planning* (Perencanaan)

Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menetapkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Yaitu sebagai cara untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa digunakan secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana yang sudah ditentukan dari awal.

Siagian (2001:5), mendefinisikan manajemen dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan sebagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Waldo (dalam Zulkifli, 2009:20), manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerja sama manusia atau melalui kegiatan orang lain. Manajemen juga merupakan alat bagi administrasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pendapat para ahli yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil kesimpulan manajemen adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk menjalani suatu organisasi dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berjalan efektif dan efisien.

2.1.4 Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Menurut J.O Udoji (dalam Wahab 2012) kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan menurut Lemieux (dalam Wahab 2012) kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses itu berlangsung sepanjang waktu.

Kemudian menurut W.I. Jenkins (dalam Wahab 2012) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Hogwood dan Gunn (dalam Suharto 2008) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- c. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
- d. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.

- e. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.
- f. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y.
- g. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang.

Menurut William N. Dunn (2003:109) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, di formulasikan ke dalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, kesehatan sampai ke pendidikan kesejahteraan.

Dari pendapat para ahli yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan terdapat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.1.5 Konsep dan Teori Implementasi

Menurut (Nurdin, 2002) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang telah terencana dalam hal pencapaian kegiatan tersebut.

Menurut (Setiawan, 2004) Implementasi adalah suatu aktifitas yang saling berkaitan dengan kegiatan interaksi antara tujuan dan dindakan mencapainya serta membutuhkan jaringan pelaksanaan suatu birokrasi yang lebih efektif.

Menurut Lester dan Stewart Implementasi adalah proses hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat melalui proses dan pencapaian tujuan-tujuan hasil akhir (*output*) yang telah ditentukan (Leo, 2006).

Menurut (Syaukani, 2004) Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka melaksanakan kebijakan untuk masyarakat sehingga kebijakan tersebut bisa membawakan hasil yang telah diharapkan.

Menurut (Suharto, 2014) Implementasi ada intinya menunjuk pada suatu perubahan proses *Planning* pada tingkat yang sangat rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk mencapainya suatu alat tujuan tersebut. Jadi menurut Suharto, bahwa suatu program Planning harus mengarah kepada perubahan yang lebih tranparan dan dalam penetapan kebijakan merupakan suatu tujuan, sedangkan alat mencapai suatu tujuan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang sudah memenuhi programnya.

Dalam pendekatan yang di teorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adalah :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standar operating procedures* (SOP). SOP menjadi

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Standar organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan organisasi tidak fleksibel.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah adanya mekanisme suatu sistem dengan kegiatan yang sudah terencana dalam mencapai tujuan kegiatan dengan saling menyesuaikan posisi interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat meraih hasil yang diharapkan sebelumnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

2.1.6 Konsep Kegiatan Rastra

Menurut (Rastra, 2017), Rastra merupakan program implementasi dari inisiatif presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan stabilitas ekonomi nasional. Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau suddulog adalah unit kerja dibawah dulog atau suddulog yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras pelaksana distribusi.

Menurut Winarni (2012), Rastra untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Menurut Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang selenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin).

Penyaluran Rastra adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (Lintas Kementrian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tuags pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Rastra.

Penyaluran Rastra bertujuan untuk mengurangi beban para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Sasaran penyaluran Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15Kg/ bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah dijelaskan dalam peraturan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan bagian konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada teori dan konsep yang ada, maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

2.3 Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu penyaluran beras sejahtera (Rastra), dimana terdiri empat indikator yaitu: komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penulis serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu memaparkan penjelasan tentang beberapa konsep operasional sebagai berikut:

- a. Administrasi Publik adalah suatu rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Organisasi Publik adalah serangkaian aktifitas kolektif sekelompok orang yang di awali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, penegelasan wewenang, pengawasan dan Implementasi yang dilakukan di Desa Siabu Kabupaten Kampar.
- c. Manajemen Publik adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi manajemen.
- d. Implementasi Kebijakan adalah mekanisme suatu sistem dengan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan mencapainya dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat Dusun sai abang kabupaten Kampar.

- e. Kegiatan Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah di Dusun Sai abang Kabupaten Kampar.
- f. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi sosialisasi mengenai penyaluran Rastra kepada Dusun Sai abang Kabupaten Kampar.
- g. Sumber Daya adalah hal yang penting dalam pelaksanaan implementasi penyaluran Rastra yang dilaksanakan di Dusun Sai abang Kabupaten Kampar.
- h. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Sai abang Kabupaten Kampar dalam penyaluran Rastra.
- i. Struktur Birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* dalam penyaluran Rastra yang dilaksanakan di Dusun Sai abang Kabupaten Kampar.

2.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 2.1: Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Katagori
1	2	3	4	5
Implementasi adalah adanya mekanisme	Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA)	1. Komunikasi	a. Sosialisasi penyaluran Rastra b. Formulir rekapitulasi pengganti c. Biaya Rastra	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Sumber Daya	a. Kemampuan SDM pendukung b. Waktu	Terlaksana Cukup Terlaksana

<p>sme suatu sistem dengan kegiata n yang sudah terenca na dalam menca pai tujuan kegiata n dengan saling menyes uaikan posisi inrtaksi antara tujuan dan tindaka n untuk menca pai kebijak an kepada</p>	<p>di Desa Siabu Kabupaten Kampar</p>		<p>pendistribusian Rastra c. Pelaporan penyaluran Rastra</p>	<p>Kurang Terlaksana</p>
		3. Disposisi	<p>a. Tanggapan penyaluran Rastra b. Kebutuhan pangan c. Kuota penyaluran Rastra</p>	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>
		4. Struktur Birokrasi	<p>a. Kualitas SDM b. Pembagian tugas c. Sikap petugas</p>	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

masyar akat sehing ga kebijak an tersebu t dapat meraih hasil yang diharap kan sebelu mnya.(Edwar d III).				
--	--	--	--	--

2.5 Teknik Pengukuran

Adapun indikator penelitian ini penulis bagi kedalam tiga ukuran yaitu: Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana. Adapun teknik pengukuran untuk penelitan penulis sebagai berikut:

Implementasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra):

Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 67%- 100% .

Cukup Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil tanggaan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 1%-33%.

Adapun indikator-indikator diastis dikatakan berhasil Terlaksana, Cukup Terlaksana dan Kurang Terlaksana hasilnya diukur dengan menggunakan pedoman antara lain :

1. Kominikasi

Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 67%- 100% .

Cukup Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil tanggaan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 1%-33%.

2. Sumber Daya

Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 67%- 100% .

Cukup Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil tanggaan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 1%-33%.

3. Disposisi

Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 67%- 100% .

Cukup Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil tanggaan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 1%-33%.

4. Struktur Birokrasi

Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 67%- 100% .

Cukup Terlaksana :Apabila hasil tanggapan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil tanggaan responden pada katagori terimplementasi terhadap penyaluran beras sejahtera (Rastra) berada pada rentang presentase 1%-33%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang di peroleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam menerapkan lokasi penelitian ini maka penulis melakukan penelitian yaitu di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Pemilihan Desa tersebut karena merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

3.3 Populai dan Sampel

1. Populasi

Menurut Komaruddin populasi semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Siabu, Perangkat Desa, Penerima Rastra, dan Masyarakat yang tidak menerima Rastra.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari objek yang diteliti atau bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi terlalu besar peneliti tidak dapat mempelajari keseluruhan populasi, karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka hal ini peneliti menggunakan sampel yang di ambil dari populasi.

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Sub Populasi	Populasi	Sample	Persentase
1.	Staf Kecamatan Salo	2	2	4%
2.	Kepala Desa Siabu	1	1	2%
3.	Perangkat Desa	3	3	11%
4.	Penerima Rastra Dusun Sai abang	30	30	65%
5.	Masyarakat yang tidak menerima Rastra	10	10	22%
	Jumlah	46	46	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang di perlukan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel dengan cara sebagai berikut: Kepala Desa Siabu, perangkat Desa, Penerima Rastra, dan masyarakat yang tidak menerima Rastra menggunakan tchnik sensus dimana semua populasi dijadikan sampel.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitan terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dengan menggunakan wawancara, penyebaran kuesioner dan data ini tentunya berkenaan

dengan Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lainya yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dipegunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuisisioner (angket) yaitu penelitian membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian disebarakan kepada responden yang dijadikan sample yang penelitian ini.
- b. Teknik Wawancara/Interview Teknik pengmpulan data dilakukan dengan memebrikan sejumlah pertanyaan lisan maupun tanya jawab secara terarah. Penelitian mengacu pada pedoman wawancara/interview yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutup

kemungkinan mengacu sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.

- c. Teknik Observasi Pengumpulan data dengan memahami berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.
- d. Teknik Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara meneliti laporan-laporan, dokumentasi-dokumentasi, catatan, arsip serta berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang perolehan data secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kuantitatif. Teknis analisa data deskriptif kuantitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan angket atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan.

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 :Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/Bulan/Minggu															
		Apl-mai			Jun-Jul			Ags-Sep			Okt-Nov			Des-Jan		Feb-Mar	
1	Penyusunan UP																

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan krgunaan penelitian.

BAB II :STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

Pada bab ini berisikan uraian dari pengertian, definisi dan konsep dan teori-teori yang menyangkut daftar pustaka, kerangka fikir, konsep operasional, operasional variabel, serta teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal dan waktu kegiatan.

BAB IV : DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai evaluasi kebijakan program beras miskin (studi pelaksanaan program beras miskin di desa siabu kecamatan salo kabupaten kamoar).

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitan yang penulis tentukan kemudian diberikan saran atas temuan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Sebelum menjelaskan tentang visi dan Misi Kabupaten Kampar Peneliti akan Sedikit membahas tentang Desa Sibau, Kecamatan Salo, Kabupaten/Kota Kampar, Provinsi Riau dan terbentuk Desa Siabu pada bulan Juni, Tahun 1925, Luas (Ha) 100 Ha, Koordinat Bujur 150 Lintang Selatan, Koordinat Lintang 150 Lintang Utara, Ketinggian DPL(M) 200-400 mDpl.

Visi merupakan suatu gambaran dalam mencapai keadaan masa depan yang mewujudkan, Visi menjadi acuan untuk ke depan serta manjadikan dalam kerangka pencapaian kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Adapun Visi Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. VISI

“Mewujudkan Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Dengan Masyarakat Yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradat Menuju Masyarakat Sejahtera”

Misi adalah membantu menjelaskan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus di lakukan dalam suatu dokumen perencanaan, misi menjadi hal yang terpenting dalam memberikan krangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah jalan untuk mencapai visi tersebut. Adapun Misi Kabupaten Kampar Sebagai Berikut:

2. MISI

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional
2. Membuka kawasan pertanian yang modren
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
4. Melestarikan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat

5. Melestarikan Kabupaten Kampar sebagai serambi mekkahnya Riau
6. Mempertahankan brand image bahwa Kampar berbudaya, berakhlak dan religius

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Adapun fungsi Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, dan administrasi kependudukan.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pengembangan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
 - c. Pemeberdayaan msyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemeberdayaan keluarga, pemda, olahraga dan karang taruna.
 - d. Menjaga hubungan kemitraan, dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekertaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintah desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Sekertaris desa sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi kepala urusan.
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - c. Melaksanakan urusan umum. Seperti penetapan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- d. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya.
3. Kepada Seksi Urusan Umum bertugas membantu urusan umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Kepala Seksi Urusan Umum sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dan umum termasuk melaksanakan pelayanan kebersihan, ketertiban, keamanan balai desa.
 - b. Pelayanan konsumsi harian perangkat desa dan rapat-rapat.
 - c. Meyediakan sarana dan prasarana perangkat desa.
 - d. Pengadministrasian aset.
 4. Kepada Seksi Perekonomian bertugas memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan seksi perekonomian. Adapun fungsi kepala seksi perekonomian sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi ekonomi sesuai dengan kebijakan dan program kerja desa.
 - b. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas atau petunjuk kades.
 - c. Memebrikan arahan kerja kepada bawahan serta memeriksa hasil pekerjaan yang sudah ditetapkan.
 - d. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan stuan kerja lainnya di dalam maupun di luar lingkungan desa tentang pelayanan desa publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian.
 5. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Kepada Seksi Pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan manajemen tata peraja pemerintahan.

- b. Membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa.
 - c. Penataan dan pengelolaan kewilayahan.
 - d. Melakukan pendataan mengenai pengelolaan profil desa.
6. Kepala seksi urusan pembangunan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan dahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun fungsi kepala seksi urusan pembangunan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan keperluan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
 - c. Mengelola tugas pembantuan.
 - d. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pucuk pimpinan.
7. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemberdaya masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun fungsi kepala seksi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan Desa/Kelurahan.
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan Desa/Kelurahan.
 - c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
8. Kepada Dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi kepala Dusun sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan nya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdaya masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.

4.3 Jumlah Penduduk Desa Siabu Kabupaten Kampar

Desa Siabu mempunyai jumlah penduduk 6005 jiwa, yang terbesar dalam Empat wilayah Dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Dusun	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1.	Karya Nyata	2050	524
2.	Muaro Siabu	1546	375
3.	Pinaso	1270	226
4.	Sai Abang	1139	115
	Total	6005	1240

Sumber: Kantor Desa siabu 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menjelaskan jumlah penduduk Desa Siabu Kabupaten Kampar tahun 2020 dengan total keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan data dari desa siabu tahun 2020 adalah sebesar 6005 jiwa dan memiliki 1240 KK yang terbesar dalam empat dusun yaitu karya nyata, muaro siabu, pinaso, dan sai abang. Secara umum penyebaran penduduk merata, hanya saja penyebaran penduduk yang paling padat yaitu berada di dusun karya

nyatamemiliki jumlah 2050 jiwa, dan penyebaran penduduk yang paling sedikit yaitu berada di dusun sai abangdengan jumlah penduduk 1139 jiwa.

4.4 Struktur Oeganisasi Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur mendukung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan pembuatan keputusan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Desa Siabu berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber : Kantor Desa Siabu 2020

4.5 Sumber Daya Organisasi Kantor Desa Siabu

Pengelolaan sumber daya organisasi merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Organisasi modern menetapkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (*brainware*) sehingga perlu di kelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas. Peningkatan sumber daya organisasi dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat kabupaten kampar dan sekitarnya. Jumlah sumber daya organisasi disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Desa Siabu dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

1. Manusia (*Man*)

Sumber daya manusia yang ada pada Desa Siabu Kabupaten Kampar yang dapat mencapai tujuan atau visi dan misi organisasi yaitu sebanyak 16 orang. Yang terdiri dari 15 pegawai laki-laki dan 1 pegawai perempuan.

Dalam menjalankan tugas Desa Siabu Kabupaten Kampar juga di dukung oleh faktor pendidikan yang menjadi acuan tercapainya tujuan organisasi. Berikut pendidikan pegawai Desa Siabu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 4.2 :Jumlah Pegawai Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Stara Satu (S1)	2	20%
2.	SLTA Sederajat / SMA	12	60%
3.	SMP	1	10%
4.	SD	1	10%
Jumlah		16	100%

Sumber: Kantor Desa Siabu 2020

Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang berpendidikan formal Stara Satu (S1) sebanyak 2 orang, untuk SLTA Sederajat/SMA 12 orang, untuk SMP sebanyak 1 orang, dan untuk SD sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai di kantor desa siabu lebih banyak lulusan SMA. Oleh karena itu diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan di desa.

2. **Perlengkapan (Material)**

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pada kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar, sehingga dapat diharapkan sarana dan prasarana di kantor Desa Siabu bisa di pergunakan untuk melayani masyarakat yang datang ke kantor desa tersebut.

Adapun yang menjadi inventaris dari Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Daftar Inventaris Kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Nama Barang/ Alat	Jumlah (Unit)
1.	Kantor Desa	1
2.	Ruang Kerja	6
3.	Ruang Tunggu	1
4.	Printer	4
5.	Lemari Arsip	10
6.	Meja dan kursi tamu	2
7.	Meja dan kursi kerja	6
8.	Komputer	4
9.	Kendaraan Dinas	1
10	Kipas Angin	2

Sumber: Kantor Desa Siabu 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat ditunjukkan bahwa kantor Desa Siabu Kabupaten Kampar telah memiliki daftar inventasris atau fasilitas yang memadai, hal tersebut dapat di lihat bahwa instansi tersebut telah memiliki kantor desa 1 unit, printer 4 unit, lemari arsip 10 unit, meja dan kursi kerja 6 unit, meja dan kursi tamu 2 unit, komputer 4 unit, kendaraan dinas 1 unit,dan kipas angin 2 unit. Diharapkan kepada pengurus agar dapat menjaga sarana dan prasarana tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Teknologi (*Machine*)

Pada zaman era globalisasi teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalani seluruh rangkaian aktifitas organisasi yaitu Desa Siabu Kabupaten Kampar. Pengguna teknologi adapat menghemat pengeluaran organisasi seperti komputer yang digunakan untuk penyimpanan data-data dan dukungan dengan penggunaan internet sebagai alat komunikasi dan penghubung organisasi satu dengan yang lain, hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan di suatu organisasi.

4. Aturan (*Method*)

Aturan merupakan sebagai landasan para personil atau pegawai dalam organisasi terkait berkafasitas. Seperti pada Desa Siabu Kabupaten Kampar melakukan tugas dana fungsi sesuai praturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian telah di simpulkan sejumlah data yang diperlukan meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang mengenai Implementasi kegiatan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar.

5.1 Identitas Responden

Guna mendapatkan data yang akurat, maka penulis menentukan identitas responden tentang Nama, Jenis Kelamin, Tingkat Umur, dan Tingkat Pendidikan yang disebarkan kepada responden yang terpilih.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetik dari responden yang menilai mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 :Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Jenis Kelamin Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	12	33%
2.	Perempuan	24	67%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data Oloha Penulis 2020

Dari tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa responden perempuan lebih mendominasi yaitu sebanyak 24 orang. Hal tersebut karena pada saat penulis membagikan kuisioner di desa siabu, yang penulis jumpai adalah responden

perempuan yang berkerja sebagai petani, sedangkan responden laki-laki sedang berkerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Selanjutnya dari tingkat jenis kelamin responden dan Informan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.2 :Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Jenis Kelamin Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase (%)
1.	Laki-laki	2	20%
2.	Perempuan	8	80%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa responden perempuan lebih mendominasi yaitu sebanyak 8 orang sedangkan responden laki-laki sebanyak 2 orang. Hal tersebut karena pada saat penulis membagikan kuesioner di desa siabu rata-rata responden yang penulis jumpai adalah responden perempuan yang berkerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan responden laki-laki sedang berkerja.

2 Tingkat Umur

Faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Terutama dalam menentukan pilihan, tingkat usia akan memeberikan pengaruh semakin tinggi usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan pilihan yang ditentukan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Tingkat usia dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, bahkan dapat mempengaruhi pola dan standar kemampuan

fisik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Responden yang telah terpilih yaitu masyarakat penerima Rastra dan masyarakat tidak menerima Rastra untuk Implementasi kegiatan penyaluran Beras Sajahtera di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3 :Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Tingkat Umur Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Umur	Jumlah	Presentase %
1.	20-30	5	14%
2.	31-40	15	42%
3.	41-50	13	36%
4.	50 Tahun Keatas	3	8%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa responden dan Informan menurut tingkat umur yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 0 atau 0% dari keseluruhan responden. Responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 5 orang atau 14% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Untuk responden yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 15 atau 42% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Selanjutnya responden yang berusia antara 41-50 tahun berjumlah 13 orang atau 36% dari jumlah keseluruhan responden yang ada, sedangkan untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 3 atau 8%.

Selanjutnya dari tingkat umur responden dan Informan dapat di lihat berikut ini:

Tabel 5.4 :Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Tingkat Umur Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Umur	Jumlah	Peresentase %
1.	20-30	1	10%
2.	31-40	1	10%
3.	41-50	5	50%
4.	50 Tahun Keatas	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden masyarakat yang berusia dibawah 20 tahun sebanyak 0 orang atau 0%. Sedangkan jumlah responden masyarakat yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 1 orang atau 10% dari jumlah seluruh responden yang ada. Untuk responden masyarakat yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 1 orang atau 10% dari seluruh responden masyarakat yang ada. Selanjutnya responden yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 50% dari jumlah seluruh responden yang ada. Dan yang terakhir responden dengan usia diatas 50 tahun sebanyak 3 orang atau 30% dari jumlah seluruh responden yang ada. Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden masyarakat terbanyak berada diantara usia 41-50 tahun yaitu berjumlah 5 orang. Namun semuanya acak dalam kontribusi usi produktif.

3. Tingkat Pendidikan

Adapun yang menjadi latar belakang dijadikannya tingkat pendidikan dalam item pertanyaan adalah karena jenjang pendidikan yang ditempuh oleh responden dan Informan terhadap Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 5.5 : Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Tingkat Pendidikan Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	1	3%
2.	SMP	10	28%
3.	SMA	17	47%
4.	D3	5	14%
5.	S1	3	8%
6.	S2	0	0%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel 5.5 di atas, dapat di lihat bahwa pendidikan responden relatif tinggi, responden yang tamat SMA 17 orang atau 47%, 10 responden tamat SMP atau 28%, 1 responden tamat SD atau 3, 5 responden tamat D3 atau 14%, 3 responden tamat S1 atau 8% dan kebanyakan responden hanya menamatkan pendidikan SMA yaitu sebanyak 11 orang.

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran responden akan pentingnya pendidikan, kebanyakan perekonomian responden yang tidak mampu menjadi salah satu alasan responden tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya dari tingkat pendidikan responden masyarakat yang tidak menerima rastra dapat dilihat berikut ini :

Tabel 5.6 : Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Tingkat Pendidikan Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1.	SD	5	50%
2.	SMP	2	20%
3.	SMA	3	30%
4.	D3	0	0%
5.	S1	0	0%
6.	S2	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Dari tabel 5.6 diatas, dapat dilihat bahawa pendidikan responden relatif rendah, hanya ada 3 responden yang tamat SMA atau 30%, 2 responden tamat SMP atau 20% dan kebanyakan responden hanya menamatkan pendidikan SD yaitu sebanyak 5 responden atau 50%. Hal ini terjadi karena perekonomian responden yang rendah atau tidak mampu untuk membiayai pendidikan hingga ketingkat yang lebih tinggi lagi.

4. Mata Pencaharian

Desa siabu merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selanjutnya dapat di uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.7 :Identitas Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Menurut Mata Pencrian Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1.	Petani	23	64%
2.	Wirasuasta	3	8%
3.	Buruh	5	14%
4.	IRT	5	14%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden dengan pekerjaan yang mendominasi adalah petani yaitu sebanyak 23 responden atau 64%, hal ini dikarenakan banyaknya perkebunan karet maupun kelapa sawit, ada juga responden bertani dengan memanfaatkan rumah mereka.

Responden yang berkerja sebagai wirasuwasta sebanyak 3 responden atau 8%, dimana responden tersebut berkerja sebagai supir angkut sawit serta asisten rumah tangga di kota. Responden yang berkerja sebagai buruh sebanyak 5

responden atau 14% mereka berkerja di pabrik kelapa sawit yang ada di desa, dan 5 responden atau 14% mereka hanya sebagai ibu rumah tangga.

Selanjutnya dari tingkat pendidikan responden dan Informan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.8 :Identitas Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Menurut Mata Pencaharian Mengenai Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1.	Petani	5	50%
2.	Wirasuasta	1	10%
3.	Buruh	4	40%
4.	IRT	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden dengan pekerjaan yang mendominasi adalah petani yaitu sebanyak 5 responden atau 50%, hal ini karena banyaknya perkebunan karet dan kelapa sawit yang memperkejakan responden sebagi petani karet maupun kelapa sawit, ada juga responden bertani dengan memanfaatkan perkarangan rumah mereka. Responden yang berkerja sebagai wirasuwasta sebanyak 1 responden atau 10%, dimana responden tersebut berkerja sebagai asisten rumah tangga. Responden yang berkerja sebagai buruh sebanyak 4 responden 40%, mereka berkerja di pabrik kelapa sawit yang ada di desa tersebut.

5.2 Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai Abang Desa Siabu Kabupaten Kampar

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil kuesioner dari jumlah tanggapan tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kampar. Dimana dalam, komunikasi Kepala Desa Siabu menjelaskan

agar tidak terjadi kesalah pahaman antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam memberikan informasi mengenai Kegiatan Penyaluran Rastra.

Komunikasi sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, untuk itu komunikasi harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena tanpa adanya komunikasi yang baik dari pemerintah sebagai imperator, kebijakan yang akan di terapkan tidak akan terimplementasi secara efektif. Karena komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kegiatan yang akan di terapkan dan dilaksanakan dalam rangka untuk menyampaikan tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Desa Siabu Mensosialisasikan Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera kepada masyarakat, sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kegiatan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Hasilnya dengan adanya sosialisasi tentang adanya Kegiatan Penyaluran Rastra masyarakat di Desa Siabu Kabupaten Kampar dapat mengetahui syarat dan prosedur mendapat Rastra sehingga pembagian Rastra tepat sasaran.

Turun langung ke masyarakat adalah pemberian informasi tentang adanya Kegiatan Penyaluran Rastra dengan langsung Tim Pelaksana turun langung ke masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan Rastra ini dapat mengetahui

adanya Kegiatan Penyaluran Rastra di Desa Siabu dusun Sai abang Kabupaten Kampar.

Sosialisasi ini sangat diperlukan untuk melihat apakah pendistribusian telah berjalan dengan maksimal atau belum dan dengan sosialisasi ini masyarakat dan aparat Desa Siabu mengerti akan tujuan, manfaat dan sasaran Rastra. Sosialisasi juga sangat mempengaruhi terhadap pendistribusian Rastra. Jika di kaitkan dengan penelitian ini maka bagaimana pendistribusian yang diberikan oleh tim pelaksana Kegiatan Penyaluran Rastra.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dan informan dari Tim Pelaksana dan masyarakat tentang pendistribusian yang didasarkan pada indikator Komunikasi, maka mengenai tanggapan responden terhadap pendistribusian Kegiatan Penyaluran Rastra di Desa Siabu Kabupaten Kampar dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9 :Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Komunikasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Sosialisasi Kegiatan Penyaluran Rastra	9	16	11	36
		25%	44%	31%	100%
2.	Formulir Rekapitulasi Pergantian	4	23	9	36
		11%	64%	25%	100%
3.	Sasaran Rastra	4	22	10	36
		11%	61%	28%	100%
Jumlah		17	61	30	108
Rata-Rata		6	20	10	36
Presentase		17%	56%	28%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penelitian sosialisasi Kegiatan Penyaluran Rastra yaitu, sebanyak 9 orang yang mengatakan terlaksana atau 25%, 16 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 44%, dan 11 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 31%. Untuk item penilain Formulir Rekapitulasi Pengganti yaitu, sebanyak 4 orang yang mengatakan terlaksana atau 11%, 23 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 64%, dan 9 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 25%. Dan untuk item penilaian Sasaran Rastra yaitu, sebanyak 4 orang yang mengatakan terlaksana atau 11%, 22 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 61%, dan 10 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 28%.

Berdasarkan hasil analisa distribusi jawaban responden mengenai komunikasi kegiatan penyaluran rastra dusun sai abang kabupaten kampar sebanyak 56% sehingga dapat dikatakan cukup terlaksana karena apabila masyarakat dusun sai abang melaksanakan komunikasi dengan cukup terlaksana jika berada 34%-66%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nurbaini selaku Sekertaris Desa Siabu Tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwa informasi mengenai Kegiatan Penyaluran Rastra perlu di sampaikan kepada masyarakat yang menerima Rastra di Dusun Saiabang Kabupaten Kampar, agar masyarakat dapat memahami tujuan dan sasaran Kegiatan Penyaluran Rastra, sehingga masyarakat dapat melengkapi persyaratan dan proses Kegiatan Penyaluran Rastra dapat dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan tujuan Kegiatan Penyaluran Rastra tersebut.

Dari wawancara dengan Sekdes Desa Siabu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa menganggap komunikasi yang dilakukan adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan suatu program agar nantinya masyarakat mengetahui Kegiatan Penyaluran Rastra tersebut, namun responden jarang mengikuti kegiatan sosialisasi mereka beranggapan bahwa

sosialisasi kurang begitu penting dan lebih memilih untuk berkerja diladang dari pada mengikuti sosialisasi.

Sengkang menurut hasil Jawaban Responden dan Informan yang ada di Desa Siabu, adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5.10 :Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Komunikasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Sosialisasi Kegiatan Penyaluran Rastra	1	4	5	10
		10%	40%	50%	100%
2.	Formulir Rekapitulasi Pergantian	1	5	4	10
		10%	50%	40%	100%
3.	Sasaran Rastra	1	1	8	10
		10%	10%	80%	100%
Jumlah		3	10	17	30
Rata-Rata		1	3	6	10
Presentase		10%	30%	60%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penelitian sosialisasi kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 1 orang yang mengatakan terlaksana atau dengan presentase 10%, 4 orang yang mengatakan cukup terlaksana dengan presentase 40%, dan 5 orang yang mengatakan kurang terlaksana dengan presentase 50%. Untuk item penilaian formulir Rekapitulasi Pengganti yang mengatakan terlaksana ada 1 orang atau dengan presentase 10%, 5 orang yang mengatakan cukup terlaksana dengan presentase 50%, dan 4 orang yang mengatakan kurang terlaksana dengan presentase 40%, sedangkan untuk

item penilaian sasaran rastra 1 yang mengatakan terlaksana atau dengan presentase 10%, 1 orang yang mengatakan cukup terlaksana dengan presentase 10% , dan 8 orang yang mengatakan kurang terlaksana dengan presentase 80%.

Berdasarkan hasil analisa distribusi jawaban responden mengenai komunikasi kegiatan penyaluran rastra dusun sai abang kabupaten kampar sebanyak 60% sehingga dapat dikatakan cukup terlaksana karena apabila masyarakat dusun sai abang melaksanakan komunikasi dengan cukup terlaksana jika berada 34%-66%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan perangkat Desa Siabu pada tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan memperoleh informasi mengenai kegiatan penyaluran rastra melalui Sekdes dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan penyaluran rastra sebab diperoleh informasi dari sekdes maupun pihak desa yang lebih menyediakan wadah penyampaian informasi melalui selebaran yang di bagikan pihak desa kepada para warga yang merupakan anggota PKH dan juga RTS-PM pengetahuan mengenai sosialisasi mengenai kegiatan penyaluran rastra sangat di perlukan karena suatu program akan mudah mencapai keberhasilan dan dalam pelaksanaannya, semakin baik pula pemahaman masyarakat semakin terdorong untuk mengakses informasi mengenai kegiatan penyaluran rastra.

Dari wawancara dengan Perangkat Desa Siabu Kabupaten Kampar dapat di simpulkan bahwa dapat masyarakat Dusun Sai abang menganggap pelaksanaan komunikasi yang tidak diatur secara jelas sehingga menyebabkan komunikasi di Dusun Sai abang menjadi bervariasi dan lemah. Komunikasi yang lemah tentu saja berpengaruh kepada masyarakat tidak menerima rastra sehingga masih ada masyarakat yang belum paham atau tidak sama sekali paham mengenai kegiatan penyaluran rastra yang dilaksanakan di Desa mereka.

Adapun dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini, kegiatan penyaluran rastra telah dilaksanakan di Dusun Sai abang,

tetapi masih adanya beberapa responden sulit untuk memahami informasi mengenai kegiatan penyaluran rastra ditambah lagi dengan pendidikan responden yang rendah.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak terlalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumber daya juga merupakan unsur pelaksanaan yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi Implementasi suatu kebijakan.

Sumber daya yang di maksud dalam penelitian ini adalah ketersedianya sumber-sumber pendukung Implementasi Kegiatan Penyaluran Rastra tersebut, penengung jawab dalam Kegiatan Penyaluran Rastra di Desa Siabu Kabupaten Kampar dalam tingkat Desa adalah Kepala Desa. Jadi Kepala Desa bertanggung jawab dalam Kegiatan Penyaluran Rastra.

Pelaksana dalam kegiatan penyaluran Rastra ini dilaksanakan sesuai dengan Tim Pelaksana yaitu terdiri dari Kepala Desa, Tim Pelaksana Pendistribusian dan berkerjasama dengan RT/RW setempat. Jadi di harapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Rastra dapat berkerja sama.

Berdasarkan hasil kuisioner dari jumlah tanggapan tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar. Dimana dalam, tempat jumlah Kepala Desa Siabu menjelaskan agar tika terjadi kesalah pahaman antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam memberikan informasi mengenai Kegiatan Penyaluran Rasta.

Jawaban responden dan informan tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar diukur beberapa sub indikator sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.11 :Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Sumber Daya Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kemampuan SDM pendukung	15	10	11	36
		42%	28%	31%	100%
2.	Waktu Pendistribusian Rastra	5	13	18	36
		14%	36%	50%	100%
3.	Pelaporan Kegiatan Prnyaluran Rastra	4	18	14	36
		11%	50%	39%	100%
Jumlah		24	41	43	108
Rata-Rata		8	14	14	36
Presentase		22%	39%	39%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.11 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penelitian kemampuan SDM pendukung yaitu sebanyak 15 orang yang mengatakan terlaksana atau 42%, 10 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 28%, dan 11 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 31%. untuk item penilaian waktu pendistribusian rastra yaitu, sebanyak 5 orang yang mengatakan terlaksana atau 14%, 13 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 36%, dan 18 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 50% dan untuk item pelaporan kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 4 orang yang mengatakan terlaksana atau 11%, 18 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 50%, dan 14 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 39%.

Berdasarkan hasil analisa distribusi jawaban responden mengenai Sumber Daya Kegiatan Penyaluran Rastra Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sebanyak 39% sehingga dapat dikatakan cukup terlaksana karena berada di antara 34%-66% yaitu dalam interval cukup terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nurbaini selaku Sekertaris Desa Siabu Tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwasanya ketersediaan sumber daya dalam Kegiatan Penyaluran Rastra sudah efektif. Sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya kegiatan penyaluran rastra dilakukan setiap bulan, jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen kondisi geografis dan hambatan geografis, sehingga kegiatan penyaluran rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di wilayah, maka kegiatan penyaluran rastra dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh pemerintah daerah setempat.

Dari wawancara dengan Sekdes Siabu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Penyaluran Rastra dapat berjalan secara efektif apabila pembagian Rastra Kepada RTS-PM sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Waktu Kegiatan Penyaluran Rastra adalah sebanyak 12 kali dalam setahun, untuk waktu pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah. Namun Rastra yang dibagikan tidaklah penuh setiap bulanya selama setahun dikarenakan pegu lebih banyak dari pada jumlah pegu. Sehingga pembagian rastra di rastra di dusun sai abang belum sepenuhnya.

Apabila dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini, ketersediaan sumber daya untuk Kegiatan Penyaluran Rastra seperti persolin, anggaran/biaya, peralatan dan kewenangan yang dimiliki pelaksanaan kebijakan menurut responden terlaksana, responden berpendapat ketersediaan sumberdaya disesuaikan dengan Kegiatan Penyaluran Rastra yang dibutuhkan sehingga mencegah terjadinya penyimpangan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden dan informan Dusun Sai abang yang berjumlah 10 orang tidak terhadap indikator sumber daya dapat dilihat pada tabel 5.12 sebagai berikut :

Tabel. 5. 12 :Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Sumber Daya Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai abang Desa Siabu Kabupaten Kamapar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kemampuan SDM pendukung	2	1	7	10
		20%	10%	70%	
2.	Waktu Pendistribusian Rastra	0	3	7	10
		0%	30%	70%	
3.	Pelaporan Kegiatan Prnyaluran Rastra	0	0	10	10
		0%	0%	100%	
Jumlah		2	4	24	30
Rata-Rata		1	1	8	10
Presentase		10%	10%	80%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.12 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penelitian kemampuan SDM pendukung yaitu, sebanyak 2 orang yang mengatakan terlaksana atau 20%, 1 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 10%, dan 7 orang yang mengatkan kurang terlaksana atau 70%. Untuk item penilaian waktu pendistribusian rastra yaitu, sebanyak 0 orang yang mengatakan terlaksana atau 0%, 3 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 30%, dan 7 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 70%. Dan untuk item pelaporan kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 0 orang yang mengatakan terlaksana atau 0%, 0 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 0%, dan 10 orang yang mengatakan kurang terlaksana 100%.

Berdasarkan hasil analisa distribusi jawaban responden mengenai Sumber Daya Kegiatan Penyaluran Rastra Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sebanyak Presentase 80% Kurang Terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan perangkat Desa Siabu pada tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwa sejauh ini yang dilakukan pemerintah desa sudah mencapai hasil yang di inginkan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanggil perwakilan dari setiap dusun untuk melakukan Kegiatan Penyalura Rastra di dusun tersebut, sehingga masyakat dapat mengetahui pelaksanaan penyaluran ini.

Dari wawancara dengan perangkat Desa Siabu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa masyarakt Dusun Sai abang menganggap masih ada beberapa masyarakat yang tidak seharusnya menerima rastra lagi, namun masih terdaftar sebagai penerima rastra sesuai dengan data yang ada dipusat. Hal ini dilakukan pendataan ulang kembali dalam menerapkan RTS agar tujuan dan sasaran dari Kegiatan Penyaluran Rastra dapat dicapai sesuai dengan yang sirencanakan.

Adapun dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini, responden menyatakan kurangnya usaha pemerintah Dusun Sai abang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penyaluran rastra tersebut, sehingga tidak sedikit masyarakt yang kurang paham apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kegiatan penyaluran rastra tersebut. Kurang pemahaman masyarakat mengenai Kegiatan Penyaluran Rastra ini sebtas beras yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakt yang berhak menerima rastra.

3 Disposisi

Disposisi merupakan kegiatan keinginan atau kesempatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksanaan bukan hanya

mengetahui apa yang harus mereka jalankan dan memiliki kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dengan implementator kebijakan dan hendaknya di antara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini aparatur pemerintah kabupaten kampar khususnya aparatur pemerintah Desa Siabu.

Sehubungan dengan indikator disposisi/ sikap yang dilakukan oleh pemerintah Desa Siabu dalam rangka implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera beberapa sub indikator disposisi/sikap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Tentang Disposisi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Tanggapan Kegiatan Penyaluran Rastra	6	18	12	36
		17%	50%	33%	100%
2.	Kebutuhan Pangan	10	18	8	36
		28%	50%	22%	100%
3.	Kuota Kegiatan Penyaluran Rastra	5	20	11	36
		14%	56%	31%	100%
Jumlah		21	56	31	108
Rata-Rata		7	19	10	36
Presentase		19%	53%	28%	100%

Sumber : Olahan Data Lapangan 2020

Dari tabel 5.13 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penilaian tanggapan kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 6 orang yang mengatakan terlaksana atau 17%, 18 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 50%, dan 12 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 33%. Untuk item penilaian kebutuhan pangan yaitu, sebanyak 10 orang yang mengatakan terlaksana

atau 28% , 18 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 50%, dan 8 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 22%. dan untuk item penilaian kuota kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 5 orang yang mengatakan terlaksana atau 14%, 20 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 56%, dan 11 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 31%.

Berdasarkan hasil analisa distribusi jawaban responden mengenai disposisi Kegiatan Penyaluran Rastra Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sebanyak 53% sehingga dapat dikatakan cukup terlaksana karena apabila masyarakat dusun sai abang melaksanakan dengan cukup terlaksana jika berada 34%-66%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nurbaini selaku Sekertaris Desa Siabu pada Tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwasanya Kegiatan Penyaluran Rastra sudah cukup tepat dalam membantu masyarakat dusun Sai abang dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin lama semakin meningkat jadi dngan adanya Kegiatan Penyaluran Rastra ini masyarakat masih terbantu dalam meringankan beban pengeluaran keluarga sehari-hari.

Dari wawancara dengan Sekdes Siabu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Penyaluran Rastra ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena sangat bermanfaat dalam mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pangan keluarga mereka.

Adapun dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini, responden masyarakat komitmen terhadap tugas penyaluran rastra merupakan kepastian bagi pelaksana kegiatan penyaluran rastra itu sendiri. Sikap komitmen juga sering di tunjukkan saat rapat koodinasi baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan. Yang menimbulkan banyak masalah ketika dilakukan RTS-

PM program yang tentunya membutuhkan sikap pelaksana yang jujur, transparan dan akuntabel. Dengan begitu kegiatan penyaluran rastra, terutama dalam melaksanakan tugas mereka selalu memperlihatkan sikap komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan kegiatan penyaluran rastra.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden dan Informan Masyarakat Dusun Sai abang yang berjumlah 10 tidak menerima Penyaluran Rastra terhadap insikator dapat dilihat pada tabel 5.14 sebagai berikut:

Tabel 5.14 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Disposisi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Tanggapan Kegiatan Penyaluran Rastra	1	4	5	10
		10%	40%	50%	100%
2.	Kebutuhan Pangan	1	3	6	10
		10%	30%	60%	100%
3.	KuotaKegiatan Penyaluran Rastra	2	1	7	10
		20%	10%	70%	100%
Jumlah		4	8	18	30
Rata-Rata		1	3	6	10
Presentase		10%	30%	60%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.14 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penilaian tanggapan kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 1 orang yang mengatakan terlaksana atau 10%, 4 orang mengatakan cukup terlaksana atau 40%, dan 5 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 50%. untuk item penilaian kebutuhan pangan yaitu, sebanyak 1 orang yang mengatakan terlaksana atau 10%, 3 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 30%, dan 6 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 60%. untuk item penilaian kuota kegiatan penyaluran rastra yaitu, sebanyak 2 orang yang mengatakan terlaksana 20%, 1

orang yang mengatakan cukup terlaksana 10%, dan 7 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 70%.

Berdasarkan analisa distribusi jawaban responden mengenai Disposisi Kegiatan Penyaluran Rastra Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sebanyak 60% .

Berdasarkan wawancara penulis dengan perangkat Desa Siabu pada tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwasanya kegiatan penyaluran rastra di dusun sai abang sudah cukup terlaksana dalam mencapai tujuannya, karena masyarakat pasti sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyaluran rastra ini. Walaupun dulu masyarakat harus membayar, namun kini masyarakat tidak perlu membayar lagi dan masyarakat cukup membawa kartu kegiatan penyaluran rastra yang telah diberikan oleh masing-masing dusun.

Dari wawancara dengan perangkat desa Siabu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa menilai pembagian rastra yang diterima masih kurang karena di setiap keluarga tentu saja memiliki jumlah keluarga yang berbeda-beda. Bagi anggota keluarganya sedikit mungkin dengan adanya Kegiatan Penyaluran Rastra sudah sangat membantu, tapi bagi masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang banyak tentu saja kurang tepat.

Adapun dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini, responden menyatakan masih terdapat beberapa masyarakat yang seharusnya berhak menerima penyaluran rastra ini tetapi tidak terdaftar dalam keluarga penerima manfaat (KPM), masih adanya masyarakat dusun sai abang yang belum mendapatkan penyaluran rastra ini. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa belum terlaksana kegiatan penyaluran rastra di Dusun Sai abang Kabupaten Kampar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa di dukung dengan struktur birokrasi yang baik kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan sesuatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana di lapangan.

Jawaban responden masyarakat dengan indikator struktur birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Siabu Kabupaten Kampar dalam rangka Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) diukur beberapa sub indikator struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.15 :Distribusi Jawaban Responden Masyarkat Penerima Rastra dan Informan Tentang Struktur Birokrasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kualitas SDM	13	21	2	36
		36%	58%	6%	100%
2.	Pembagian Tugas	17	18	1	36
		47%	50%	3%	100%
3.	Sikap Petugas	15	20	1	36
		42%	56%	3%	100%
Jumlah		45	59	4	108
Rata-Rata		15	20	1	36
Presentase		42%	56%	3%	100%

Sumber : Olahan Data Lapangan 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penilaian kualitas SDM yaitu, sebanyak 13 orang yang mengatakan terlaksana atau 36%, 21 orang yang mengatakan cukup terlaksana 58%, dan 2 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 6%. untuk item penilaian pembagian tugas yaitu, sebanyak 17 orang yang mengatakan terlaksana atau 47%,

18 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 50%, dan 1 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 3%. Untuk item penilaian sikap petugas yaitu, 15 orang yang mengatakan terlaksana atau 42%, 20 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 56%, dan 1 orang yang mengatakan kurang terlaksana 3%.

Berdasarkan analisa distribusi jawaban responden mengenai Struktur Birokrasi Kegiatan Penyaluran Rasta Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sebanyak 56% sehingga dapat dikatakan cukup terlaksana karena apabila masyarakat Dusun Sai abang melaksanakan dengan terlaksana jika berada 34%-66%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nurbaini selaku Sekertaris Desa Siabu pada Tanggal 12 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwasanya sasaran dari program ini yaitu masyarakat yang berhak menerima rasta dan yang terdaftar di pusat. Sasaran sudah tepat, karena yang mendapatkan penyaluran rasta adalah masyarakat yang tidak mampu dalam perekonomiannya. Hasil yang di capai dalam program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena adanya program ini masyarakat tidak perlu memikirkan biaya lagi untuk membeli beras, masyarakat cukup membawa kartu penyaluran rasta untuk mendapatkan beras 15Kg dengan kualitas terbaik. Pemuktahiran data nya kurang update jadi ada juga beberapa penerima sudah mampu, sudah meninggal atau sudah pindah namun tetap terdaftar dalam penerima manfaat penyaluran rasta. Jadi memang masih ada beberapa masyarakat di Dusun Sai abang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan penyaluran rasta namun mereka tidak mendapatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Siabu Kabupaten Kampar dapat di simpulkan bahwa rasta yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yaitu 15Kg/bulan, namun masyarakat tidak menerima rasta 15Kg hal ini terjadi karena rasta tidak hanya di bagikan kepada RTM-PM sehingga rasta yang dibagikan kepada masyarakat menjadi berkurang.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden dan Informan Dusun Sai abang yang berjumlah 10 orang tidak menerima penyaluran rastra terhadap indikator struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut ini :

Tabel 5.16 :Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Tentang Struktur Birokrasi Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar

No.	Item Penelitian	Pengukuran Indikator			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kualitas SDM	1	2	7	10
		10%	20%	70%	100%
2.	Pembagian Tugas	1	3	6	10
		10%	30%	60%	100%
3.	Sikap Petugas	2	1	7	10
		20%	10%	70%	100%
Jumlah		4	6	20	30
Rata-Rata		1	2	7	10
Presentase		10%	20%	70%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap item penilaian kualitas SDM yaitu, sebanyak 1 orang yang mengatakan terlaksana atau 10%, 2 orang yang mengatakan cukup terlaksana 20%, dan 7 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 70%. untuk item penilaian pembagian tugas yaitu, sebanyak 1 orang yang mengatakan terlaksana atau 10%, 3 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 30%, dan 6 orang yang mengatkan kurang terlaksana atau 60%. untuk item penilian sikap petugas yaitu, 2 orang yang mengatakan terlaksana atau 20%, 1 orang yang mengatakan cukup terlaksana atau 10%, dan 7 orang yang mengatakan kurang terlaksana atau 70%.

Berdasarkan analisa distribusi jawaban responden mengenai Struktur Birokrasi Kegiatan Penyaluran Rastra Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sebanyak 70% .

Berdasarkan wawancara penulis dengan perangkat desa siabu pada tanggal 12 oktober 2020, beliau bahwa manjeleskan bahwasanya sasaran dari program ini masyarakat yang berhak untuk mendapatkan rastra dan tentunya sudah terdaftar yang ditetapkan dari pusat khususnya di dusun sai abang kabupaten kampar hasil yang dicapai bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakat bisa mendapatkan 15Kg beras dengan gratis. Jadi masyarakat hanya datang menunjukkan kartu penyaluran rastra setelah itu masyarakat bisa membawa beras tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa siabu kabupaten akampar dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyaluran rastra di dusun sai abang belum bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada rumah tangga dalam memnuhi kebutuhan konsumsinya. Ketidak tepatan jumlah rastra yang diterima oleh RTS-PM di daerah dusun sai abang, tidak hanya diberlakukan sistem bagi rata atau dibagikannya rastra kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar. Tidak terdaftarnya beberapa masyarakat dusun sai abang yang tergolong rendah dan berhak menerima rastra, namun masyarakat tidak bisa mengambil rastra tersebut pada waktu penyaluran.

Adapun dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian ini, responden menyatakan kurang terlaksana karena mereka beberapa kali melakukan pengaduan kepada pihak desa mengenai kuota beras yang dinilai masih kurang sesuai. Responden menilai bahwa pengaduan mereka oleh pihak desa sudah diterima, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak pelaksana rastra sehingga pengaduan responden sia-sia.

Berdasarkan uraian-uraian ke tempat indikator tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 5. 17 berikut ini :

Tabel 5.17 :Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Penerima Rastra dan Informan Indikator Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai Abang Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Komunikasi	6	20	10	36
		17%	56%	28%	100%
2.	Sumber Daya	8	14	14	36
		22%	39%	39%	100%
3.	Disposisi	7	19	10	36
		19%	53%	28%	100%
4.	Struktur Birokrasi	15	20	1	36
		42%	56%	3%	100%
Jumlah		36	73	35	144
Rata-Rata		9	18	9	36
Presentase		25%	50%	25%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari tabel 5.17 di atas dapat diketahui bahwa rekapitulasi ke tempat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar, terlihat dari hasil rata-rata indikator terlihat pada kategori terlaksana berjumlah 9 dengan persentase 25%, kategori cukup terlaksana berjumlah 18 dengan persentase 50%, kategori kurang terlaksana berjumlah 9 orang dengan 25%.

Dari hasil rekapitulasi masyarakat penerima rastra tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar yang terdiri dari indikator komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi maka dapat dikatakan cukup terlaksana dengan persentase 50%.

Hal ini terlihat bahwa masih adanya beberapa masyarakat dusun sai abang yang tidak terdaftar dalam keluarga penerima manfaat dan kurang update basis data terpadu yang ada pada pemerintah. Hasil yang didapat dari kegiatan penyaluran rastra ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran mereka sehari-hari.

Tabel 5.18 : Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Tidak Menerima Rastra Indikator Tentang Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai Abang Desa Siabu Kabupaten Kampar

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Komunikasi	1	3	6	10
		10%	30%	60%	100%
2.	Sumber Daya	1	1	8	10
		10%	10%	80%	100%
3.	Disposisi	1	3	6	10
		10%	30%	60%	100%
4.	Struktur Birokrasi	1	2	7	10
		10%	20%	70%	100%
Jumlah		4	9	27	40
Rata-Rata		1	2	7	10
Presentase		10%	20%	70%	100%

Sumber : *Olahan Data Lapangan 2020*

Dari table 5.18 diatas dapat diketahui bahwa rekapitulasi keempat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tentang implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar, terlihat dari hasil rata-rata indikator terlihat pada kategori terlaksana berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, kategori cukup terlaksana berjumlah 2 orang dengan persentase 20%, kategori kurang terlaksana berjumlah 7 orang dengan persentase 70%.

Dari hasil rekapitulasi masyarakat tidak menerima rasta tentang implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu dusun sai abang kabupaten kampar yang terdiri dari indikator-indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi maka dapat dikatakan Terlaksana dengan persentase 70%. Jika kita lihat perincian table di atas dari setiap indikator yaitu:

1. Komunikasi : Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar dari indikator komunikasi **Cukup Terlaksana** dengan presentase sebanyak 56% artinya dari komunikasi dalam implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu cukup memadai namun perlu di tingkat kan lagi.
2. Sumber Daya: Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar dari indikator sumber daya **Cukup Terlaksana** dengan presentase 39% artinya dari sumber daya dalam implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu cukup memadai namun perlu di tingkat kan lagi sumber dayanya agar memahami pedoman umum Raskin.
3. Disposisi: Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di desa siabu kabupaten Kampar dari indikator disposisi **Cukup Terlaksana** dengan presentase 53%, artinya dari disposisi dalam implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu kabupaten Kampar sudah baik, namun ada perbaikan sikap para pelaksana tentang prosedur pendistribusian Raskin karna seharusnya pelaksana lebih tegas dalam pendistribusian Raskin.

4. Struktur Birokrasi: Implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu kabupaten Kampar dari indikator struktur birokrasi **Cukup Terlaksana** dengan presentase 56%, artinya struktur birokrasi dalam implementasi kegiatan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa siabu kabupaten Kampar sudah baik, tetapi perlu di tingkatkan lagi koordinasi antara pihak kecamatan dan desa dalam pendistribusian rastra sehingga rastra tepat sasaran dan waktu dan pengawasan dari kecamatan lebih di tingkatkan lagi

Hal ini terlihat bahwa ada masyarakat yang seharusnya menerima rastra di dusun sai abang namun mereka tidak mendapatkan rastra karena tidak terdaftar data keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan oleh pusat.

5.3 Hambatan dari Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Dusun Sai Aabng Desa Siabu Kabupaten Kampar

Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Kabupaten Kampar masih adanya yang belum terimplementasi secara maksimal hal ini di sebabkan beberapa kendala yaitu:

Pertama, dari segi Komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan penyaluran rastra, menurut analisa penulis dikarenakan pendapat antara pelaksana dan masyarakat bertolak belakang yaitu menurut keterangan pelaksana dari kecamatan sosialisasi dilakukan 3 kali dalam setahun dan menurut keterangan dari kepala desa pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sedangkan menurut masyarakat tidak pernah dilakukan sosialisasi dari keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sosialisasi rastra kurang sehingga masyarakat di Desa Siabu tidak

mengetahui siapa yang berhak menerima atau mendapat rastra serta syarat dan ketentuan tentang pendistribusian dan penerimaan rastra.

Kedua, dari segi Sumber Daya yaitu kurang memahami pedoman umum Kegiatan rastra karena adanya toleransi yang begitu besar dari kepala desa beserta aparatnya dan juga seluruh masyarakat menginginkan untuk mendapatkan rastra, sehingga di sepakati dalam musyawarah desa semua masyarakat desa siabu mendapat rastra dengan ketentuan yang mampu dan yang tidak mampu tetap mendapat rastra, yang mana hal tersebut menyalahi aturan dalam pendistribusian Rastra.

Ketiga, dari segi Disposisi/sikap yaitu kurang tegasnya pelaksana dalam pendistribusian Rastra, dikarenakan adanya hubungan darah antara masyarakat bukan penerima dan pelaksana sehingga diadakan rembuk musyawarah desa yang menyatakan membagi sama rata rastra kepada seluruh masyarakat Desa Siabu hal ini terjadi karena kurang tegasnya kepala desa sebagai penanggung jawab pendistribusian Rastra di tingkat desa.

Keempat, dari segi Struktur Birokrasi yaitu kurangnya koordinasi antar pihak kecamatan dan desa yang menyebabkan pendistribusian Rastra tidak tepat sasaran dan waktu, jadi menurut analisa penulis koordinasi kurang terjalin di karenakan kepala desa dan masyarakat desa siabu mengadakan musyawarah desa yang berasaskan toleransi sehingga pihak kecamatan tidak mengetahui bahwa rastra di bagi sama rata kesemua masyarakat desa siabu.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sudah cukup terlaksana, dan cukup mampu mengatasi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari. Untuk lebih jelasnya kesimpulan di sajikan dalam beberapa indikator Implementasi menurut Edward III yang menjadi tolak ukur dalam penulisan, diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikais : Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sudah cukup terlaksana, namun masi adanya beberapa masyarakat Dusun Sai abang yang belum memahami tentang Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tersebut. Hal ini memberikan bahwa kurangnya usaha pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi tentang Kegiatan Penyaluran Rastra kepada masyarakat Dusun Sai abang Desa Siabu.
2. Sumber Daya : Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sudah cukup terlaksana, karena masyarakat Dusun Sai abang merasa terbantu akan Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera ini dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.
3. Disposisi : Kegiatan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sudah cukup telaksana, karena masih

adanya beberapa masyarakat Dusun Sai abang yang berhak menerima Rastra namun tidak masuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

4. Struktur Birokrasi : Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar sudah cukup terlaksana, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Dusun Sai abang masih ada yang tidak terdaftar ke dalam KPM serta kurang telitinya Pemerintah Desa dalam menyaring data penduduk yang berhak untuk menerima Rastra di Desa Siabu Dusun Sai abang Kabupaten Kampar.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Siabu Kabupaten Kampar agar Kegiatan Penyaluran Rastra tetap di laksanakan karena Kegiatan penyaluran tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama dalam hal pangan serta membantu mengurangi beban pengeluaran.
2. Kepala Desa Siabu Kabupaten Kampar untuk lebih memperbaiki waktu pembagian beras agar sesuai dengan pedoman umum Rastra yang telah ditetapkan.
3. Dalam Kegiatan Penyaluran Rastra masyarakat yang menjadi sasaran utama program, maka dari itu sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang konsep beras tersebut, begitupun juga dengan pemerintah.

4. Diharapkan dalam kegiatannya terdapat kontrol atau pengawasan oleh pemerintah setempat, baik dimulai dari penetapan rumah tangga penerima manfaat Rastra hingga pada pelaksanaan pembagian beras sampai kerumah tangga penerima manfaat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono,L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustiono, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Bandung : CV : Alfabeta.
- Agustino, Leo.2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Aldi Bandung Pusat KPEW Lemit UNPAD.
- Akdon. (2014). *Manajemen Strategic Untuk Manajemen Pendidikan (Strategic Manajement For Educational Manajement)*. Bandung : Alfabeta.
- Ali,Zaini,& Raden Iman Al Hafis, 2015, *Teori Kebijakan Publik*. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Bungin,M. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jalarta : kencana.
- Bustanul Arifin dan Didik J.Rachbini.2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hamim, Sufian. 2005. *Manajemen Strategis*.Pekanbaru:UIR Perss.
- Hunger, D.J. (2001). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta,: Andi.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*, Yogyakarta, Gava Media.
- Islamy, Irfan.2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Madani, Muhlis. 2011. *Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maulidiah, Sri, 2014. *Pelayana Publik*. Bandung:CV : Indra Parhasta.
- Ndraha, Talizuhu. 2011. *KYBERNOLOGY: Ilmu Pemerintahan Baru jilid 2*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Obadia Indonesia.

N.Dunn, William.1999.*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.

Purwnato,E. A. (2012), *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Grava Media.

Restu Kartiko widi. 2010 . *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Riduwan,2014, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitan*. Bandung: Penerbit Alfabeth.

Robbins,Stephen P. 1994. *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcan.

Setiawan,G. (2004). *Implementasi dalam Birorasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Askara.

Siagian, Sondang P. 2003. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta:CV. Gunung Agung.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharto,Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Syafiie, Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung: Bumi Askara.

Syafi'i, Inu Kencana, dkk. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solihin Abdul. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UM press.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.

Zilkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR press.

Zulkifli, Awang, Azam, dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Dokumentasi :

Masyarakat Berpendapatan Rendah) Kabupaten Kampar.

Peraturan Bupati Kampar Nomor Kampar Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Rastra (Beras Bersubsidi Untuk

Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PKM/.05/2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan No./254/PKM.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga Negara.

Lampiran 1